Abstract

This study analyzes the authority of the Gorontalo Provincial Government in eradicating online gambling based on Law Number 23 of 2014, Law Number 11 of 2008 and its amendments, and related regulations. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the provincial government implements preventive strategies (education and outreach), repressive strategies (legal enforcement with the police), and the formation of the PASTI Task Force. The main obstacles include limited resources, regulatory gaps, low digital literacy, and the transnational nature of online gambling. The study concludes that there is a need for strengthened coordination, improved regional regulations, increased capacity of the apparatus, and community participation through digital literacy and cross-sector collaboration.

Keywords: *Provincial Government Authority, Online Gambling, Regional Law, PASTI Task Force, Digital Literacy.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemberantasan judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, dan regulasi terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menjalankan strategi preventif (edukasi dan sosialisasi), represif (penindakan hukum bersama kepolisian), serta pembentukan Satgas PASTI. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, celah regulasi, rendahnya literasi digital, dan sifat transnasional judi online. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi, perbaikan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat melalui literasi digital dan kolaborasi lintas sektor.

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah Provinsi, Judi Online, Hukum Daerah, Satgas PASTI, Literasi Digital.

Dipindai dengan CamScanner